



Analisis Implementasi Kebijakan Luar negeri non-Intervensi Tiongkok Terhadap Myanmar Pasca Kudeta Militer Februari 2021

Sahbuddin Dg. Palabbi¹ & Ahmad Qisai²

¹² Paramadina Graduate School of Diplomacy, Universitas Paramadina

¹ ASN Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup

ARTICLE INFO:

Paper Type:

Research Paper

Keywords:

Tiongkok, Non-Intervensi, Myanmar, Kebijakan Luar Negeri, Kudeta Militer 2021

Article History

Received: 5 February 2025

Revised: 6 April 2025

Accepted: 4 June 2025

Available online: 3 July 2025

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi implementasi prinsip non-intervensi Tiongkok terhadap Myanmar pasca kudeta militer Februari 2021. Landasan teori yang digunakan yaitu prinsip non-intervensi serta teori pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanasi dengan tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data melalui studi literatur dari berbagai sumber pustaka yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun secara historis Tiongkok menjadikan non-intervensi sebagai pilar utama diplomasi sejak era Zhou Enlai 1953, pada praktiknya prinsip ini mengalami fleksibilitas signifikan, terutama ketika dihadapkan pada situasi konflik internal Myanmar yang menyentuh kepentingan strategis Tiongkok. Prinsip ini telah berubah dari retorika normatif menjadi instrumen diplomatik strategis dan selektif. Perubahan prinsip non-intervensi Tiongkok menjadi pendekatan pragmatis mulai terlihat sejak April 2021, ketika Tiongkok terlibat aktif dalam proses diplomasi ASEAN, hingga menekan junta untuk melindungi investasinya, mempercepat proyek-proyek CMEC, dan merestrukturisasi ulang mekanisme proyek. Analisis berdasarkan teori pengambilan keputusan mengungkap bahwa respon Tiongkok mencerminkan pendekatan aktor rasional, di mana pemerintah bertindak sebagai entitas tunggal yang membuat keputusan berdasarkan kalkulasi untung-rugi untuk memaksimalkan kepentingan nasional. Dengan demikian, prinsip non-intervensi Tiongkok lebih tepat dipahami sebagai alat diplomatik yang lentur dan instrumental, bukan sebagai doktrin tetap yang dijalankan secara konsisten.

*Corresponding author: sahbuddin.palabbi2@students.paramadina.ac.id

Cite this article as: Pallabi, S. D. dan Qisai, A. (2025). *Analisis Implementasi Kebijakan Luar negeri non-Intervensi Tiongkok Terhadap Myanmar Pasca Kudeta Militer Februari 2021*. Paramadina Journal of Diplomacy & Foreign Policy, 02 (01), 1-10.

<https://journal.paramadina.ac.id/index.php/diplomacyforeignpolicy>

1. Latar Belakang

Prinsip non-intervensi mengandung pengertian bahwa suatu negara tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Dalam hubu-

ngan internasional, prinsip ini merupakan konsekuensi logis dari kedaulatan, dan telah menjadi metode penting untuk menghadapi anarki internasional. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi landasan tatanan internasional kontem-

porer dan norma kritis politik internasional (Ren, 2013).

Sejalan dengan hal tersebut, prinsip non-intervensi juga menjadi dasar kebijakan luar negeri Tiongkok. Konsep tersebut berasal dari perjanjian aliansi Tiongkok-Uni Soviet awal 1950, ditetapkan sebagai bagian dari “Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai” pada 1953 dan kemudian diadopsi dalam “Sepuluh Prinsip” Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955 (Zheng, 2016). Tiongkok semakin menegaskan prinsip ini pasca insiden Tiananmen 1989, dan menunjukkan penolakan terhadap intervensi kemanusiaan dari Barat. Prinsip ini pun menjadi pedoman dan alat retorika utama diplomatik Tiongkok (Zheng, 2016). Sebagai implementasi, Tiongkok tidak memaksakan nilai-nilainya kepada negara lain, justru menggunakan non-intervensi untuk mempererat hubungan dengan negara berkembang. Dengan berjanji tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara yang secara politik lebih lemah, Tiongkok menciptakan citra sebagai superioritas moral. Hal ini membuat banyak pemimpin negara berkembang menyambut baik pendekatan Tiongkok (Ren, 2013).

Tiongkok juga merangkul negara-negara yang dianggap bermasalah oleh negara Barat, khususnya negara-negara yang sering dituduh melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti Myanmar. Selama pemerintahan militer absolut (1962–2011), Myanmar dijatuhi sanksi dan diboikot oleh negara-negara industri besar Barat (Folia, 2012; Dossi & Gabusi, 2022). Tekanan tersebut terus berlanjut di masa SLORC (1988-1997) dan SPDC (1997-2010) termasuk setelah penyerangan Daw Suu Kyi dan partainya pada Mei 2003 (Han, 2017; Seekins, 2021). Sejak pertengahan 2017, krisis Rohingya menambah tekanan internasional terhadap Myanmar, disertai ancaman sanksi ekonomi dari negara Barat (Yhome, 2019).

Pasca kudeta militer Februari 2021, Myanmar kembali mendapat sorotan dunia. Beberapa negara Barat menjatuhkan sanksi, dan PBB mengeluarkan resolusi terkait larangan perdagangan senjata dengan Myanmar (Ambarawati, 2022). Namun, Tiongkok memilih abstain, bahkan menolak resolusi PBB yang mengutuk kudeta sebagai perwujudan kebijakan non-

intervensinya (Chan, 2021; Seekings, 2021; Sutter & Huang, 2021; Thida, 2021).

Selama konflik berlangsung, hubungan Tiongkok-Myanmar tetap terjaga, terutama terkait dukungan pasokan militer. Myanmar juga memanfaatkan posisi Tiongkok untuk memperoleh perlindungan dari sanksi melalui hak veto Tiongkok di PBB (Ambarawati, 2022; Seekins, 2021). Hubungan ini berkaitan dengan dukungan diplomatik, senjata dan perdagangan (Saxena, 2021). Akibatnya publik diaspora Myanmar mencurigai bahwa Tiongkok berada di balik tragedi kemanusiaan pasca kudeta karena dinilai mendukung junta militer demi kepentingan strategisnya (Thida, 2021). Tiongkok berharap stabilitas politik segera pulih agar kerja sama ekonomi antar kedua negara tidak terhambat (Aurellia dkk., 2021; Ramadhani & Mabru-rah, 2021; Seekins, 2021).

Kudeta 2021 juga dianggap sebagai peluang bagi Tiongkok untuk memulihkan pengaruhnya yang sempat menurun sejak pemerintahan semi-sipil mulai berkuasa pada 2011 (Seekins, 2021; Thida, 2021; Dossi & Gabusi, 2022). Di tengah ketidakstabilan, junta tetap melanjutkan proyek strategis Tiongkok dalam kerangka “Inisiatif Sabuk dan Jalan” (Thida, 2021). Di saat yang sama, Tiongkok juga membangun komunikasi dengan aktor lain termasuk kelompok etnis bersenjata. Pendekatan ini mencerminkan strategi pragmatis Tiongkok dalam menghadapi politik domestik Myanmar yang terpecah, demi menjaga pengaruh dan kepentingan nasional (Han, 2024).

Dengan kekuatan ekonomi dan politiknya, Tiongkok memainkan peran penting di Asia Tenggara. Myanmar menjadi pasar yang penting untuk investasi dan proyek infrastruktur Tiongkok (Saxena, 2021). Para kritikus seperti Qiu Lin, Xie Yiqiu dan Wang Jiangbo, menilai bahwa non-intervensi “pasif” Tiongkok merupakan cara untuk melindungi kepentingan luar negerinya. Sejumlah analis bahkan menyarankan agar Tiongkok menyesuaikan prinsip tersebut demi meningkatkan reputasinya sebagai kekuatan global yang bertanggung jawab (Zheng, 2016).

Mengamati jejak internasional Tiongkok yang semakin meningkat, menimbulkan pertanyaan apakah prinsip non-intervensi benar-benar dijalankan secara konsisten atau mengalami

perubahan mengikuti kepentingan strategisnya. Tulisan ini bertujuan menganalisis konsistensi Tiongkok dalam menerapkan prinsip non-intervensi, khususnya dalam konteks Myanmar.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanasi, yaitu pendekatan yang memberikan interpretasi mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Boeije, 2010). Pemilihan metode ini didasarkan pada pertanyaan penelitian, yang diawali dengan kata “bagaimana,” sehingga menuntut pendekatan eksploratif dan interpretatif. Dalam hal ini, peneliti berusaha menjelaskan konsistensi Tiongkok dalam menerapkan prinsip non-intervensi, serta sejauh mana kebijakan tersebut tetap dijalankan atau mengalami pergeseran dalam kasus Myanmar.

Data penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh dari penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, laporan kebijakan luar negeri, serta berita media daring yang relevan. Pendekatan ini bertujuan menggali informasi secara komprehensif mengenai kebijakan luar negeri Tiongkok dalam konteks dinamika geopolitik Myanmar pasca kudeta militer Februari 2021. Fokus utama terletak pada implementasi prinsip non-intervensi dan potensi pergeseran menuju pragmatisme geopolitik, yang tercermin dari keterlibatan Tiongkok dengan aktor domestik Myanmar seperti junta militer dan kelompok etnis bersenjata.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (library research) secara daring (online), mempertimbangkan kemudahan akses terhadap sumber digital serta keterbatasan waktu, biaya, maupun akses ke data primer. Upaya permohonan wawancara dan permintaan dokumen ke instansi terkait telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, pendekatan literatur dipilih sebagai metode paling rasional dan efisien untuk menelusuri narasi kebijakan, sikap diplomatik, serta respon strategis Tiongkok terhadap krisis Myanmar melalui dokumen resmi, publikasi akademik, dan liputan media internasional. Studi literatur sesuai digunakan dalam penelitian hubungan internasional yang membutuhkan interpretasi atas kebijakan negara melalui data tekstual dan wacana kebijakan (Zed, 2004; Neuman, 2014). Analisis

data dilakukan dalam 3 (tiga) tahap aktivitas yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi sesuai metode Miles & Huberman (1984) dalam Abdussamad (2021).

3. Landasan Teori

Prinsip Non-Intervensi

Prinsip non-intervensi secara umum berarti bahwa suatu negara tidak boleh mencampuri atau melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain, yang berada dalam yurisdiksi domestik negara tersebut. Prinsip ini menunjukkan sikap diplomatik untuk menghormati kedaulatan negara lain dan menolak campur tangan dalam urusan internal (Zheng, 2016). Prinsip non-intervensi telah menjadi *code of conduct* dalam hubungan internasional sejak Westphalia, dan menjadi norma utama dalam interaksi antar negara berdaulat, dengan kedaulatan sebagai landasan utamanya (Ambarawati, 2022).

Dalam tatanan Westphalia, norma ini hanya akan berjalan efektif apabila setiap negara saling menghormati dan mengakui kedaulatan satu sama lain. Para pemimpin negara menyadari bahwa untuk menjalankan hak atas kendali penuh di wilayahnya, mereka juga harus menghormati hak yang sama milik negara lain. Menghargai batas wilayah negara lain, menjadi syarat bagi terjaminnya kedaulatan dan keamanan negara sendiri (Brown & Ainley, 2005).

Teori Pengambilan Keputusan dalam Kebijakan Luar Negeri

Terdapat 3 (tiga) model pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri menurut Allison (1971):

- Model Aktor Rasional; menempatkan pemerintah/negara sebagai aktor utama yang mempertimbangkan semua pilihan dan bertindak atas kemungkinan tindakan terbaik, berdasarkan perhitungan rasional dengan memilih dari berbagai alternatif yang memiliki "hasil" tertinggi.
- Model Proses Organisasi; menjelaskan bahwa pilihan pemerintah didasarkan pada prosedur kerja baku organisasi, dengan pencapaian tujuan minimum dan meminimal-

kan risiko kegagalan. Keputusan akhir dicapai berdasarkan batasan waktu dan informasi, serta dilakukan melalui mekanisme organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

- c. Model Birokrasi Politik; Aktor negara berusaha mencapai tujuan terpisah yang mungkin bertentangan. Berbagai individu, yang mewakili berbagai kepentingan, terlibat dalam suatu proses untuk mencapai keputusan kelompok yang akan mewakili kebijakan negara. Kelemahan model ini adalah kebijakan dapat berubah seiring berkembangnya kepentingan kelompok /negara, pergeseran kekuasaan serta perubahan kepemimpinan.

Artikel ini menggunakan Model Aktor Rasional untuk menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Myanmar, pasca kudeta militer 1 Februari 2021. Model ini menjelaskan bagaimana Tiongkok secara terpusat dan kalkulatif mengambil keputusan strategis guna memaksimalkan kepentingan nasionalnya, seperti perlindungan investasi, stabilitas regional, dan keberlangsungan proyek-proyek strategis. Keputusan Tiongkok untuk tidak mengecahkan kudeta bukanlah bentuk dukungan pasif, melainkan hasil pertimbangan untung-rugi yang rasional dan berhati-hati. Tetap berpegang pada prinsip non-intervensi secara formal, sembari aktif menjaga stabilitas dan pengaruh ekonomi-politik, menunjukkan strategi rasional Tiongkok untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan geopolitik dan ekonomi di Asia Tenggara.

4. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Prinsip Non-Intervensi Tiongkok terhadap Myanmar (1950-2020)

Sebagai salah satu pilar utama dalam kebijakan luar negeri Tiongkok, prinsip ini pertama kali diformulasikan secara eksplisit oleh Zhou Enlai pada tahun 1953 sebagai bagian dari Five Principles of Peaceful Coexistence, dan kemudian diadopsi dalam Sepuluh Prinsip Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955 (Zheng, 2016). Sejak saat itu, prinsip non-intervensi menjadi doktrin diplomatik utama Beijing, yang

ditegaskan kembali dalam pembukaan Konstitusi Tiongkok tahun 1982 dan dikukuhkan pasca Insiden Tiananmen 1989, sebagai bentuk penolakan terhadap intervensi berbasis hak asasi manusia dari negara-negara Barat.

Dalam hubungannya dengan Myanmar, prinsip non-intervensi Tiongkok berakar sejak awal hubungan diplomatik kedua negara. Myanmar merupakan salah satu negara non-komunis pertama yang mengakui Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1950, dan sejak itu kedua negara mengembangkan hubungan yang disebut *pauk-phaw* atau “persaudaraan istimewa” (Han, 2017).

Hubungan ini dibingkai melalui kesepakatan “Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai” pada tahun 1954 yang menjadi fondasi awal prinsip non-intervensi Tiongkok, khususnya dengan Myanmar. Meski bersikap hati-hati untuk tidak mencampuri urusan internal Myanmar, terdapat kekhawatiran dari pihak Yangon atas keberadaan pasukan Kuomintang (KMT) dan aktivitas Partai Komunis Burma (BCP) yang memiliki hubungan ideologis dengan Beijing (Han, 2017).

Namun, prinsip tersebut tidak bertahan konsisten. Selama periode Revolusi Kebudayaan (1966–1976), Beijing mengeksport ideologi radikal ke komunitas Tionghoa di Myanmar, yang memicu kerusuhan anti-Tionghoa pada 1967. Sebagai respon, Tiongkok memutuskan hubungan diplomatik dan memberikan dukungan militer dan logistik kepada gerilyawan BCP, termasuk pendirian rumah sakit, penyiaran radio, serta bantuan keuangan. Lebih dari 20.000 km² wilayah perbatasan Myanmar dikuasai BCP dengan bantuan langsung Beijing. Tindakan ini jelas melanggar prinsip non-intervensi. Baru pada pertengahan 1980-an, Tiongkok menghentikan dukungannya terhadap BCP, yang menyebabkan bubarnya BCP pada tahun 1989 (Han, 2017).

Memasuki akhir 1980-an, hubungan Tiongkok dan Myanmar kembali membaik. Setelah peristiwa Tiananmen 1989 dan pemberangusan gerakan pro-demokrasi 1988 di Myanmar, kedua rezim otoriter menemukan alasan bersama untuk saling mendukung. Tiongkok kembali menegaskan komitmen pada prinsip non-intervensi, dan memberikan perlindungan diplomatik pada junta Myanmar, termasuk memveto resolusi Dewan

Keamanan PBB pasca tragedi Depayin 2003 (Han, 2017).

Sejak 1988 hingga 2010, Myanmar berada di bawah rezim militer (SLORC dan SPDC). Selama periode ini, prinsip non-intervensi Tiongkok diterapkan secara konsisten. Beijing menjadi pelindung diplomatik Myanmar dari tekanan internasional, seperti ketika memveto resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2007 yang mengancam junta. Tiongkok menjadi mitra dagang dan investor utama, terutama di sektor energi dan pertambangan. Pada 2009, kedua negara menyepakati pembangunan pipa minyak mentah dan gas yang menghubungkan pelabuhan Kyaukphyu ke Kunming. Jalur pipa ini memiliki arti strategis besar bagi ketahanan energi Tiongkok karena menghindari jalur Selat Malaka dan mencerminkan strategi geopolitik Tiongkok di Myanmar (Han, 2017). Namun, perubahan drastis terjadi pasca pemilu 2010, ketika pemerintahan semi-sipil Thein Sein mulai melakukan reformasi politik dan menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat (AS) serta negara-negara Barat. Kunjungan Hillary Clinton (2011) dan Barack Obama (2012, 2014) menandai normalisasi diplomatik Myanmar dan AS. Akibatnya, posisi Tiongkok mulai dipertanyakan, terutama setelah proyek bendungan Myitsone yang didanai Tiongkok ditangguhkan. Sentimen anti-Tiongkok di publik Myanmar meningkat, dan Beijing mulai kehilangan pijakan diplomatik (Han, 2017).

Ketegangan memuncak saat konflik Kachin (2011–2013), ketika Tiongkok untuk pertama kalinya bertindak sebagai mediator perdamaian, mengirim utusan khusus dan menekan pihak bertikai untuk berdialog. Ini merupakan penyimpangan nyata dari prinsip non-intervensi (Han, 2017). Respon Tiongkok terhadap konflik Kokang (2015) bahkan lebih keras. Serangan udara Myanmar yang menewaskan lima warga negara Tiongkok, memicu tekanan publik. Pemerintah Tiongkok menyampaikan protes diplomatik dan menuntut permintaan maaf. Nasionalisme domestik dimanfaatkan sebagai alat tekanan diplomatik, dan prinsip non-intervensi secara praktis ditanggalkan demi membela kepentingan nasional dan sentimen publik (Han, 2017). Sejak saat itu, prinsip non-intervensi Tiongkok tampak mengalami penyesuaian secara pragmatis. Pengalaman pahit Beijing atas perubahan haluan

Myanmar di bawah Thein Sein termasuk penangguhan proyek Bendungan Myitsone dianggap sebagai “pengkhianatan” yang membuat Beijing mengevaluasi pendekatannya. Beijing mulai menjalin hubungan dengan aktor-aktor non-negara termasuk Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menjelang Pemilu 2015 (Han, 2024; Han, 2017).

Pada masa pemerintahan Aung San Suu Kyi (2016–2021), pendekatan Beijing menunjukkan peningkatan keterlibatan aktif dan pragmatis. Hubungan dengan NLD dibangun melalui pengiriman utusan khusus seperti Sun Guoxiang dan Song Tao (Yhome, 2019). Tiongkok mendorong kelompok-kelompok etnis bersenjata seperti United Wa State Army (UWSA) dan National Democratic Alliance Army (NDAA) untuk ikut serta dalam 21st Century Panglong Peace Conference, serta memberikan bantuan dana USD 3 juta. Beijing juga berperan menekan kelompok bersenjata agar tidak mengganggu stabilitas perbatasan dan proyek-proyek ekonominya (Yhome, 2019).

Dalam krisis Rohingya, Tiongkok secara terbuka membela pemerintah Myanmar di forum internasional. Beijing menolak resolusi PBB yang mengutuk militer Myanmar, dan mendorong solusi damai melalui kerja sama bilateral maupun regional, bukan tekanan internasional (Yhome, 2019). Pendekatan ini menunjukkan penggunaan selektif prinsip non-intervensi untuk melindungi sekutu politiknya, sekaligus menolak narasi Barat mengenai intervensi kemanusiaan. Selain pembelaan politik, Tiongkok memanfaatkan stabilitas hubungan dengan pemerintahan Suu Kyi untuk memperkuat proyek China-Myanmar Economic Corridor (CMEC), sebagai bagian dari inisiatif Belt and Road, termasuk kerja sama infrastruktur strategis di Rakhine (Yhome, 2019). Dengan demikian, meskipun secara retorik Tiongkok tetap memegang prinsip non-intervensi, pada masa pemerintahan Aung San Suu Kyi kebijakan ini diimplementasikan secara fleksibel dan strategis. Tiongkok turut memengaruhi dinamika politik Myanmar, selama tidak secara langsung bertentangan dengan kedaulatan formal demi melindungi kepentingan geopolitik dan ekonominya.

Sejarah hubungan Tiongkok–Myanmar tersebut membuktikan bahwa dalam realitas hubu-

ngan internasional, prinsip-prinsip normatif seperti non-intervensi seringkali tunduk pada kalkulasi kepentingan strategis. Prinsip tersebut telah mengalami penyesuaian mengikuti dinamika domestik Myanmar dan kepentingan strategis Tiongkok.

Dinamika Prinsip Non-Intervensi Tiongkok terhadap Myanmar, Menjelang dan Saat Kudeta Militer Februari 2021

Menjelang kudeta militer Myanmar pada 1 Februari 2021, hubungan Beijing-Yangon berada dalam situasi kompleks. Secara retorik, Beijing tetap mengedepankan non-intervensi dan dukungan terhadap kedaulatan dan stabilitas Myanmar. Namun, secara strategis, Tiongkok juga menunjukkan fleksibilitas ketika kepentingan nasionalnya dipertaruhkan.

Sebelum kudeta, hubungan antara pemerintah sipil Myanmar di bawah Aung San Suu Kyi dan Tiongkok cukup erat. Pada Januari 2021 — beberapa minggu sebelum kudeta — Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi berkunjung ke Myanmar untuk menandatangani kesepakatan besar dalam proyek China-Myanmar Economic Corridor (CMEC), bagian dari Belt and Road Initiative (BRI) senilai USD 100 miliar. Dalam lawatan ini, Wang Yi bertemu dengan Suu Kyi dan Presiden Win Myint, memberikan sinyal dukungan terhadap terbentuknya pemerintahan baru hasil Pemilu 2020 (Seekins, 2021; Dossi & Gabusi, 2022).

Namun, hal ini juga diduga menimbulkan kecemburuan di kalangan petinggi militer, termasuk Jenderal Min Aung Hlaing, yang merasa terpinggirkan (Seekins, 2021). Meskipun demikian, Wang Yi juga menemui Min Aung Hlaing, yang saat itu telah menyuarakan klaim kecurangan pemilu (Dossi & Gabusi, 2022). Sikap Tiongkok yang merangkul kedua belah pihak ini mencerminkan pendekatan berhitung dalam prinsip non-intervensinya, yakni menjaga hubungan dengan seluruh aktor utama. Pendekatan ini dapat dijelaskan melalui Model Aktor Rasional (Allison, 1971), di mana pemerintah Tiongkok mengambil keputusan berdasarkan kalkulasi rasional terhadap situasi. Dengan menyeimbangkan hubungan dengan pemerintahan sipil dan militer Myanmar, Tiongkok secara strategis menjaga stabilitas kawasan dan kelangsungan

proyek seperti CMEC, demi memaksimalkan keuntungan serta meminimalkan risiko terhadap kepentingan jangka panjangnya. Saxena (2021) mengemukakan bahwa hubungan antara Tiongkok dan militer Myanmar (Tatmadaw) telah terjalin erat, dalam bidang diplomatik, ekonomi, maupun pertahanan. Namun, kemenangan besar NLD dalam Pemilu 2020 mengecewakan faksi militer dan mendorong kudeta.

Saat kudeta terjadi, sementara AS, Eropa dan PBB dengan cepat mengecam, Tiongkok memilih sikap lebih berhati-hati. Media pemerintah Tiongkok (Xinhua) menyebut peristiwa itu sebagai “perombakan kabinet besar” dan pernyataan resmi Beijing hanya menyebut bahwa Tiongkok “mencatat peristiwa tersebut” dan menyerukan agar semua pihak di Myanmar menangani perbedaan secara konstitusional untuk menjaga stabilitas (Saxena, 2021; Thida, 2021). Sikap ini mencerminkan penerapan prinsip non-intervensi dalam bentuk pasif dan formalistik. Pendekatan ini mencerminkan penerapan Model Aktor Rasional (Allison, 1971), di mana pemerintah Tiongkok mengambil sikap berhitung secara hati-hati berdasarkan kepentingan strategisnya. Dengan tidak menyebut peristiwa tersebut sebagai kudeta, serta memilih narasi yang netral, Tiongkok berusaha menjaga stabilitas hubungan diplomatik dan menghindari risiko konfrontasi terbuka. Sikap ini bukan cermin dukungan ideologis terhadap militer, melainkan langkah rasional untuk mempertahankan akses terhadap proyek strategis, meminimalkan gangguan regional, dan menghindari keterlibatan langsung dalam konflik domestik Myanmar.

Berbeda dengan Barat, Beijing memilih abstain dalam pemungutan suara Dewan HAM PBB, dan tidak mengecam langsung militer Myanmar (Seekins, 2021). Namun, sikap diam Tiongkok bukanlah cermin ketidakterlibatan. Tiongkok aktif menggunakan posisinya di PBB untuk melindungi Myanmar dari tekanan internasional. Tiongkok menolak resolusi yang mengutuk junta, memblokir pernyataan resmi, dan menggunakan hak veto di DK PBB. Beijing memperingatkan bahwa tekanan eksternal dan sanksi hanya akan memperburuk situasi (Dossi & Gabusi, 2022; Saxena, 2021; Sutter & Huang, 2022). Retorika ini mencerminkan prinsip non-intervensi yang tetap dipertahankan secara

formal, namun dalam praktiknya menjadi perisai diplomatik untuk melindungi kepentingan strategis.

Tindakan Tiongkok juga mencerminkan sikap berhitung. Tiongkok tidak ingin berkonfrontasi langsung dengan junta, sekaligus juga tidak ingin dilihat terlalu mendukung pengambilan kekuasaan, mengingat citranya di mata rakyat Myanmar. Sikap ini konsisten dengan Model Aktor Rasional, di mana Tiongkok menjaga keseimbangan diplomatik guna memaksimalkan stabilitas kawasan dan kelangsungan proyek vitalnya, sekaligus meminimalkan risiko terhadap citra internasionalnya. Sikap ambigu ini merupakan hasil kalkulasi rasional atas alternatif yang ada dan konsekuensinya terhadap kepentingan nasionalnya. Mahbubani (2022) menjelaskan bahwa Myanmar yang terisolasi dan ASEAN yang terpecah bukanlah aset bagi Beijing, melainkan ancaman yang bisa dimanfaatkan oleh kekuatan lawan. Oleh karena itu, Tiongkok tetap mendukung upaya ASEAN dalam mendorong pemulihan politik Myanmar, termasuk diplomasi “diam-diam” melalui kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara dan AS (Mahbubani, 2022). Pendekatan ini dianggap lebih sesuai dengan norma kawasan dan menjadikan prinsip non-intervensi sebagai wadah negosiasi, bukan sekadar alasan untuk tidak bertindak. Mahbubani (2022) menyarankan jika ada kesepakatan diam-diam (geopolitical trade-off) yang mendorong transisi damai, maka itu bisa dinilai sebagai diplomasi yang etis dan berhasil.

Kudeta Myanmar menjadi ujian bagi prinsip non-intervensi Tiongkok. Secara resmi, Tiongkok memang tidak mengecam junta, namun memilih menurunkan level hubungannya, misalnya tidak mengundang Min Aung Hlaing ke Tiongkok selama tiga tahun pertama pasca kudeta (Han, 2024). Ini menunjukkan bahwa Tiongkok tidak memberikan legitimasi penuh secara simbolik. Dengan demikian, implementasi prinsip non-intervensi Tiongkok terhadap Myanmar mencerminkan kombinasi antara retorika normatif, kalkulasi kepentingan strategis, serta kemampuan adaptif. Pendekatan ini sejalan dengan Model Aktor Rasional, di mana negara diposisikan sebagai aktor unitary yang mengambil keputusan secara rasional berdasarkan pertimbangan strategis. Tiongkok menggunakan prinsip ini sebagai instrumen fleksibel untuk men-

capai tujuan nasionalnya. Keputusan menjaga relasi dengan berbagai aktor sambil menahan diri dari kecaman terbuka merupakan bentuk kalkulasi rasional untuk melindungi posisi geopolitiknya serta menjamin kesinambungan proyek di kawasan.

Implementasi Prinsip non-Intervensi Tiongkok terhadap Myanmar Pasca Kudeta Militer 2021

Pasca kudeta militer Myanmar pada 1 Februari 2021, implementasi prinsip non-intervensi Tiongkok mulai dipertanyakan. Meskipun secara normatif Tiongkok tetap menyuarakan non-intervensi, dalam praktiknya mengalami pelen-turan, lebih fleksibel, kontekstual, dan strategis. Kekhawatiran terhadap stabilitas dan keamanan investasi, terutama dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI), mendorong Tiongkok untuk bertindak secara lebih aktif dan pragmatis.

Aksi massa yang melakukan pembakaran terhadap pabrik-pabrik Tiongkok di Yangon pada Maret 2021, menjadi titik balik yang signifikan. Beijing merespon keras melalui jalur diplomatik, mendorong junta menetapkan darurat militer di wilayah Hlaing Tharyar, dan memperkuat perlindungan terhadap aset-aset asing/Tiongkok (Dossi & Gabusi, 2022). Sejak itu, berbagai proyek infrastruktur Tiongkok yang sebelumnya tersendat, kembali digerakkan. Pemerintah militer menggantikan aktor sipil dalam pelaksanaan CMEC, menghapus konsultasi publik, dan menyetujui proyek-proyek besar, termasuk LNG senilai USD 2,5 miliar (Dossi & Gabusi, 2022; Thida, 2021).

Pada Agustus 2021, Tiongkok memperkuat dukungannya dengan bantuan USD 6 juta untuk 21 proyek pembangunan melalui Mekong-Lancang Cooperation Framework. Sementara itu, proyek pelabuhan Kyaukphyu dan kawasan ekonominya juga dipercepat, termasuk penandatanganan perjanjian survei pada September 2021 (Dossi & Gabusi, 2022). Namun, langkah ini menuai kritik di publik Myanmar. Survei Thida (2021) terhadap diaspora Myanmar, menemukan mayoritas masyarakat Myanmar menilai Tiongkok berpihak kepada militer dan berharap Beijing mendukung pemerintahan sipil alternatif (NUG). Namun, karena kepentingan ekonomi dan geopolitik — terutama proyek jalur

minyak dan gas Kyaukphyu dan akses ke Samudra Hindia — Beijing memilih mempertahankan hubungan fungsional dengan penguasa de facto di Naypyidaw. Meski menjaga kedekatan dengan junta, Tiongkok juga tetap berkomunikasi dengan oposisi seperti NLD serta kelompok etnis bersenjata seperti UWSA, MNDAA dan KIA (Han, 2024). Strategi hedging ini memperkuat posisi Tiongkok di tengah dinamika politik yang fluktuatif. Bahkan, indikasi keterlibatan tidak langsung dalam konflik melalui kelompok bersenjata muncul, terutama karena frustrasi Beijing terhadap kegagalan junta memberantas penipuan daring yang merugikan warga Tiongkok.

Menjelang akhir 2023, Tiongkok mulai memainkan peran mediasi, seperti melalui dialog damai di Kunming (Han, 2024). Pendekatan silent engagement ini menunjukkan bahwa prinsip non-intervensi telah bergeser menjadi instrumen realpolitik. Sikap mendukung ASEAN dan diplomasi senyap, seperti dalam Konsensus Lima Poin, menjadi saluran pengaruh Tiongkok tanpa keterlibatan terbuka (Saxena, 2021; Aurellia dkk., 2021). Transformasi prinsip non-intervensi ini disebabkan oleh tujuh faktor utama: (1) Fleksibilitas normatif untuk menyesuaikan dengan kebutuhan strategis di tengah ketidakpastian politik Myanmar; (2) Perlindungan ekonomi pasca serangan terhadap aset Tiongkok; (3) Kontrol proyek BRI pasca pelanggaran kontrol sipil; (4) Strategi hedging dengan menjaga komunikasi ke semua aktor politik; (5) Tekanan terselubung melalui aktor non-negara untuk kepentingan domestik Tiongkok; (6) Dukungan pada solusi regional ASEAN yang ramah terhadap kepentingan Beijing; (7) Transformasi prinsip non-intervensi menjadi instrumen selektif untuk mendukung stabilitas dan pengaruh jangka panjang. Dengan demikian, prinsip non-intervensi Tiongkok terhadap Myanmar telah mengalami transformasi menjadi alat politik yang lentur, responsif, dan strategis. Ia bukan lagi sekadar retorika kedaulatan, melainkan digunakan secara fleksibel untuk merespon tekanan geopolitik dan memperkuat posisi Tiongkok di Asia Tenggara.

Dinamika Perubahan Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Pasca Kudeta Myanmar Menurut Perspektif Allison

Pasca kudeta militer Myanmar pada 1 Februari 2021, kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Myanmar mengalami perubahan penting, khususnya dalam penerapan prinsip non-intervensi yang selama ini menjadi landasan diplomatik utama Beijing. Secara normatif, Tiongkok tetap mempertahankan prinsip tidak mencampuri urusan domestik negara lain. Namun, dalam praktiknya, respon Tiongkok terhadap kudeta dan dinamika internal Myanmar menunjukkan fleksibilitas yang semakin tinggi. Perubahan itu mulai tampak secara nyata pada April 2021, lalu mengkristal secara sistematis pada Mei 2021. Ini ditandai ketika Beijing mulai terlibat aktif dalam proses diplomasi ASEAN, restrukturisasi lembaga pelaksana proyek CMEC melalui penghapusan prosedur partisipasi sipil, percepatan proyek-proyek kunci, termasuk perlindungan terhadap proyek-proyek BRI, serta manuver untuk menjaga hubungan dengan berbagai aktor di Myanmar — termasuk junta militer (SAC), oposisi dan kelompok etnis bersenjata. Semua ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip non-intervensi tetap dipegang secara formal, Tiongkok mulai menerapkannya secara fleksibel dan selektif, sesuai kepentingan strategis dan kebutuhan untuk menjaga pengaruh di tengah isolasi internasional Myanmar.

Perubahan ini dapat dianalisis melalui teori pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri dari Graham Allison (1971). Dalam kerangka model aktor rasional, pemerintah Tiongkok bertindak sebagai entitas terpusat yang menghitung secara cermat konsekuensi dari setiap kebijakan. Setelah kudeta, Tiongkok tampaknya mengambil keputusan berdasarkan logika rasional untuk memaksimalkan kepentingannya di Myanmar: yaitu menjaga stabilitas kawasan, memastikan kelanjutan proyek-proyek strategis, dan mencegah meningkatnya pengaruh Amerika Serikat dan Barat melalui jalur oposisi sipil. Dengan demikian, ketidakmauan Tiongkok mengecam junta bukanlah cerminan dukungan, melainkan kalkulasi strategis yang dilandasi pertimbangan untung-rugi.

Model Aktor Rasional mengasumsikan bahwa negara adalah aktor yang bersifat unitary dan membuat keputusan secara terpusat berdasarkan proses rasional (Allison, 1971). Pemerintah dianalisis sebagai satu kesatuan yang memiliki tujuan jelas, mengevaluasi pilihan-pilihan yang

tersedia, serta memilih opsi yang dianggap paling efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks kebijakan luar negeri Tiongkok pasca kudeta Myanmar, pendekatan ini menggarisbawahi bahwa setiap keputusan yang diambil Beijing—mulai dari bahasa diplomatik yang netral, partisipasi dalam forum ASEAN, hingga perlindungan proyek strategis—bukanlah reaksi spontan atau inkonsistensi ideologis, melainkan hasil dari kalkulasi rasional yang mempertimbangkan biaya politik, potensi konflik, dan peluang untuk mempertahankan pengaruh di Myanmar. Model ini menyoroti bahwa meskipun secara normatif Tiongkok mempertahankan prinsip non-intervensi, dalam praktiknya pemerintah melakukan penyesuaian pragmatis yang dipilih dengan cermat untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan kepentingan nasional jangka panjangnya di Asia Tenggara.

Dengan demikian, transformasi prinsip non-intervensi Tiongkok dalam konteks Myanmar pasca kudeta 2021 adalah bentuk adaptasi rasional dan strategis yang dapat dijelaskan melalui model aktor rasional (Allison, 1971) yang menempatkan Tiongkok bukan sebagai negara pasif dalam konflik, tetapi sebagai aktor aktif dan kalkulatif dalam menjaga hegemoni diplomatik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

5. Kesimpulan

Prinsip non-intervensi yang selama ini menjadi landasan normatif kebijakan luar negeri Tiongkok tidak lagi diterapkan secara konsisten dan kaku dalam konteks krisis politik Myanmar pasca kudeta militer 1 Februari 2021. Tiongkok tetap menggunakan prinsip tersebut secara retorik dalam forum internasional, tetapi dalam praktiknya menerapkan pendekatan yang fleksibel, pragmatis, selektif, dan strategis untuk menjaga kepentingan geopolitik dan ekonomi nasionalnya.

Perubahan implementasi prinsip ini mulai terlihat sejak April 2021, dipicu oleh protes massa di Myanmar sebulan sebelumnya yang berujung pada pembakaran fasilitas milik Tiongkok. Sejak saat itu, Beijing mulai menempuh langkah aktif, yaitu mempercepat proyek BRI, melindungi investasinya, merestrukturisasi pelaksana proyek dari sipil ke militer, hingga memberikan

bantuan langsung kepada junta. Pada saat yang sama, Tiongkok tetap menjaga hubungan dengan aktor oposisi seperti NLD dan kelompok etnis bersenjata, menunjukkan strategi “hedging” untuk mempertahankan pengaruh dalam berbagai skenario politik di Myanmar.

Analisis teori Graham Allison (1971) menunjukkan bahwa kebijakan Tiongkok mencerminkan model aktor rasional — dengan kalkulasi untung-rugi yang ketat terhadap stabilitas dan posisi regionalnya. Dengan demikian, prinsip non-intervensi dalam praktik Tiongkok lebih tepat dipahami sebagai alat diplomatik yang lentur dan instrumental, yang digunakan secara adaptif untuk menghadapi dinamika regional, tekanan internasional, serta tantangan domestik yang berkaitan dengan kepentingan nasional Tiongkok. Ini menunjukkan bahwa dalam politik luar negeri kontemporer, norma tidak selalu dijalankan secara normatif, tetapi dapat menjadi sarana manuver strategis dalam kerangka realisme negara.

Referensi

1. Abdussamad, Z. (2021). “Metode Penelitian Kualitatif.” Makassar: CV. Syakir Media Press.
2. Ambarawati. (2022). “Sikap ASEAN Terhadap Pelanggaran HAM di Myanmar Pasca Kudeta”. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* (Online), Volume 6, No.1., diakses 30 Juni 2022.
3. Allison, G.T. (1971). “Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis.” Boston: Little, Brown and Company.
4. Aurellia, D.S., Cheryl, J.F., Gabriella, A.C., Marline, K., Nadia, S., & Veronika, A.K. (2021). “Mengukur Efektivitas Preventive Diplomacy Indonesia Di ASEAN dalam Menanggapi Konflik Kudeta Militer Myanmar 2021.” *Jurnal Sentris* (Online), (<https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sentris/article/view/5199>), diakses 1 Oktober 2022.
5. Boeije, H. (2010). “Analysis in Qualitative Research.” London: Sage Publications Ltd.
6. Brown, C., & Ainley, K. (2005). “Understanding International Relations (3rd ed.).” Palgrave Macmillan.
7. Chan, D.S.W. (2021). “Opinion – Beijing’s Position on the Myanmar Coup.” Dalam <https://www.e-ir.info/2021/03/06/opinion-beijings-position-on-the-myanmar-coup/>, diakses 14 Oktober 2022.

8. Dossi, S. & Gabusi, G. (2022). "Of constraints and opportunities. Dependent asymmetry in China-Myanmar Relations, 2011–2021." *The Pacific Review* (Online), Volume 35, No.5. (<https://doi.org/10.1080/09512748.2022.2091648>), diakses 31 Oktober 2022.
9. Folia, R.L. (2012). "Perubahan Kebijakan Luar Negeri Non-Intervensi Cina Terhadap Konflik Sudan." Skripsi. Surabaya: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga.
10. Han, E. (2017). "Geopolitics, Ethnic Conflicts along the Border, and Chinese Foreign Policy Changes toward Myanmar." *Asian Security* (Online), Volume 13, No.1. (<https://doi.org/10.1080/14799855.2017.1290988>), diakses 11 April 2023.
11. Han, E. (2025). "Competing Regimes and Multiple Stakeholders: How China Hedges its Relations with Myanmar." *East Asian Policy* (Online), Volume 16, No.4. (<https://doi.org/10.1142/S179393052400028X>), diakses 18 Juni 2025.
12. Hermann, C.F. (1990). "Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy." *International Studies Quarterly* (Online), Volume 34, No.1. (<https://doi.org/10.2307/2600403>), diakses 11 April 2023.
13. Holsti, K.J. (1982). "Restructuring Foreign Policy: A Neglected Phenomenon in Foreign Policy Theory." *Studi Dalam: Why Nations Realign: Foreign Policy Restructuring in the Postwar World*. London: Allen & Unwin.
14. Mahbubani, K. (2022). "Myanmar Coup Could Jump-Start US-China Cooperation, Through Quiet Diplomacy." *Study in: The Asian 21st Century, China and Globalization*. Singapore: Springer.
15. Neuman, W. L. (2014). "Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches." (7th ed.). Pearson Education.
16. Ramadhani, Z. dan Maburrah. (2021). "Pengaruh Prinsip Non-Intervensi ASEAN terhadap Upaya Negosiasi Indonesia Dalam Menangani Konflik Kudeta Myanmar." *Global Political Studies Journal* (Online), Volume 5, No.2. (<https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v5i2.5954>), diakses 27 September 2022.
17. Ren, M. (2013). "An Analysis on The Contradiction Between China's Non-Intervention Policy and Intervention Activities." *Ritsumeikan Journal of International Studies* (Online), Volume 13 (<https://ritsumei.repo.nii.ac.jp>), diakses 26 Oktober 2023.
18. Saxena, I. (2021). "Myanmar's Military Coup Security Trouble in Southeast Asia." *Journal of Indo-Pacific Affairs* (Online) (<https://www.airuniversity.af.edu/JIPA/Display/Article/2747554/myanmars-military-coup-security-trouble-in-southeast-asia/>), diakses 9 April 2023.
19. Seekins, M.D. (2021). "The February 1, 2021 Coup d'Etat in Burma: Some Reasons Why." *The Asia-Pacific Journal* (Online), Volume 19, No.6. (<https://apjpf.org/-Donald-M--Seekins/5562/article.pdf>), diakses 21 September 2022.
20. Sutter, R. & Huang, C.H. (2021). "Beijing's Advances Complicated by Myanmar Coup and US Resolve." *Comparative Connections: A Triannual E-Journal of Bilateral Relations in the Indo-Pacific* (Online), Volume 23, No.1. (<http://cc.pacforum.org/wp-content/uploads/2021/05/06-China-Southeast-Asia-Relations-23.1.pdf>), diakses 1 Oktober 2022.
21. Thida, H.M. (2021). "People's Perception of The Role of Foreign Power in Myanmar: A Case Study of The 2021 Military Coup." *Institute for Foreign Affairs and Trade*, 127-140.
22. Yhome, K. (2019). "Understanding China's Response to Ethnic Conflicts in Myanmar". *ORF Occasional Paper*, 188. (1-34).
23. Zed, M. (2004). "Metode Penelitian Kepustakaan." Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
24. Zheng, C. (2016). "China Debates the Non-Interference Principle." *The Chinese Journal of International Politics* (Online) Volume 9, No.3. (<https://doi.org/10.1093/cjip/pow010>), diakses 11 April 2023.